



TRIWULAN I

LAPORAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN

Disusun Oleh:
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini merupakan hasil/realisasi dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat di lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Wonosobo pada Triwulan I.

Dengan demikian Capaian Rencana Aksi Atas perjanjian kinerja Triwulan I ini menjadi tolak ukur atas kinerja yang telah dicapai setiap triwulan berikutnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi dan diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai realisasi/hasil kinerja yang dicapai terhadap Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SERAPAN KEUANGAN TRIWURAN I TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO**

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	204	Orang	204	51	25%	2.733.375.051	493.805.616	18%
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,03	3%	22.237.405	578.500	3%
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,14	14%	109.577.121	15.115.297	14%
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	0,25	25%	28.154.820	7.105.300	25%
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14	Dokumen	14	4	29%	5.000.000	1.390.000	28%
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84	Laporan	84	45	54%	63.150.000	31.414.400	50%
7		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%	100.400.000	0	0%
8		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%	50.000.000	0	0%
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	3	25%	4.000.000	333.000	8%
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%	184.802.060	27.531.734	15%
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%	810.929.832	120.942.960	15%
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10	2	20%	58.900.000	12.295.319	21%

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42	Unit	42	1	2%	23.290.004	3.700.000	16%
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (MPP)	1	Unit	1	0,03	3%	60.000.000	1.555.000	3%
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	0,03	2%	20.000.000	640.000	3%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
16		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1		0%	8.479.400		0%
17		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4		0%	56.900.000		0%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
18		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	0,13	13%	8.450.000	1.100.000	13%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
19		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sitem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450	Pelaku Usaha	450	300	67%	77.466.900	36.778.200	47%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
20		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	26	Kegiatan Usaha	26		0%	-		#DIV/0!
21		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330	Pelaku Usaha	330		0%	-		#DIV/0!

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan		
					Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16 Kegiatan Usaha	16		0%	-		#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										
23		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	3	0,12	4%	38.228.040	4.455.620	12%

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TRWULAN I TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja				Analisis Progres		Kendala	Strategi/Tindak Lanjut
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	Progres			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	204	Orang	204	51	25%				
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,03	3%				
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,14	14%				
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	0,25	25%				
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14	Dokumen	14	4	29%				
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84	Laporan	84	45	54%				
7		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%				
8		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%				
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	3	25%				
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%				
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%				
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10	2	20%				
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42	Unit	42	1	2%				
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (MPP)	1	Unit	1	0,03	3%				
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	0,03	2%				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
16		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1		0%	Dokumen Regulasi tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Insentif Penanaman Modal menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi investor serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah melalui investasi	Tidak Ada Kendala	
17		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4		0%	Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Wonosobo	1. Mengidentifikasi kondisi objektif potensi investasi unggulan/ prioritas secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor potensial. 2. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang investasi prioritas/ unggulan di Kabupaten Wonosobo	Tidak Ada Kendala	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
18		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	0,13	13%	Kegiatan Talkshow tentang Investasi dan Pelayanan Publik	1. Memanfaatkan media promosi sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan Publik yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) 2. Memberikan sosialisasi maupun promosi melalui kegiatan promosi langsung maupun melalui media sosial tentang kemudahan berusaha kepada masyarakat umum yang akan berinvestasi dapat mengurus perizinan dengan mempercepat waktu pelayanan dan memberikan informasi terkait status peizinan	Tidak Ada Kendala	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Analisis Progres		Kendala	Strategi/Tindak Lanjut	
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	Progres			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450	Pelaku Usaha	450	300	67%	1. Layanan Jemput Bola ke Pelaku Usaha/ Kegiatan PERPEGAN (Penjemputan Perizinan untuk Pedagang Agar Legal dan Aman) 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan 3. Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan	- Masih banyak pelaku usaha khususnya pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang belum memiliki Perizinan Berusaha - Identifikasi kendala penerbitan Perizinan Berusaha dan upaya peningkatan layanan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA - Kendala Penerbitan Perizinan Berusaha belum dapat diselesaikan di Tingkat Daerah	Tidak Ada Kendala	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
20		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	26	Kegiatan Usaha	26		0%				
21		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330	Pelaku Usaha	330		0%				
22		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	Kegiatan Usaha	16		0%				
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
23		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	3	0,12	4%	- Jasa Tenaga Administrasi Non-ASN - Rapat Koordinasi Pengolahan Data dan Informasi - Layanan Jemput Bola ke Pelaku Usaha	Perlu adanya data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan	Tidak Ada Kendala	

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KINERJA				POGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	% CAPAIAN KINERJA			% SERAPAN KEUANGAN			Ket.
				Target	Realisasi	% Capaian	Ket.				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,95	85,38	90,88		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pariwisata	%	7	-27.05	-386.43	25,00	1,90	7,60	
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	74,30	0,00	0,00			Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pertanian	%	5	-81.85	-1637.00				
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyar Rp.	733,90	77,73	10,59		Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	%	2	-100.00	-5000.00	25,00	0,00	0,00	
									Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	%	3	-100.00	-3333.33				
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	%	100	100.00	100,00	25,00	47,48	189,92	
									Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	%	85	100.00	117.65				
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	%	98	100.00	102.04	25,00	0,00	0,00	Tidak ada anggaran (dulu DAK non fisik)
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	%	95	100.00	105.26	25,00	17,79	71,16	

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini merupakan hasil/realisasi dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat di lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Wonosobo pada Triwulan I.

Dengan demikian Capaian Rencana Aksi Atas perjanjian kinerja Triwulan I ini menjadi tolak ukur atas kinerja yang telah dicapai setiap triwulan berikutnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi dan diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai realisasi/hasil kinerja yang dicapai terhadap Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebelumnya.